Publish by: Universitas Muhammadiyah Bengkulu
https://jurnal.umb.ac.id/index.php/jupank/index
ISSN-ONLINE: 2774-9975
ISSN-OFLINE: 2775-3018
Vol. 6, No. 2, Oktober 2026 | Hal 291-299 |
Indexed by Sinta-5, Google Scholar, etc.

JUPANK **Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan**

Implementasi Nilai Pancasila Dalam Organisasi Mahasiswa Unipma Di Era Digital

Elza Nazira[1], Ratih Armayanti[2], Muhammad Hanif[3]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun
Alamat : Jl. Auri No.14-16, Kanigoro, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63117
Email: elzanazira030@gmail.com, ratiharmayanti@gmail.com, hanif@unipma.com

Abstract

This study aims to analyze how student organizations at Universitas PGRI Madiun (UNIPMA) implement Pancasila values amidst the challenges of the digital era. Using descriptive qualitative methods, data were collected through in-depth interviews with the core administrators of UKM INKAI, KOPMA, ACCSETA, and BIMAFEB. The discussion of the research results shows that each organization uniquely integrates technology into its work programs, such as utilizing social media for national education, open-access instruments for financial transparency, and implementing strict organizational sanctions and persuasive approaches in addressing cyber ethics violations such as doxing and plagiarism. Analyzing this through the framework of Digital Citizenship Theory and Pancasila Cyber Ethics, this digitalization shifts leadership patterns to become more egalitarian and inclusive, where virtual deliberation remains prioritized as the ultimate instrument for mitigating opinion polarization on social media. However, residual impacts were found in the form of the potential erosion of social solidarity in the real world. This study concludes that digital transformation has proven effective in accelerating the reach of Pancasila's positive values. However, student organizations are recommended to implement a balanced hybrid activity model (a combination of online and offline), supported by structured digital literacy training from the rectorate.

Keywords: Pancasila, Student Organization, UNIPMA, Digital Era.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana organisasi mahasiswa di Universitas PGRI Madiun (UNIPMA) mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan era digital. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus inti UKM INKAI, KOPMA, ACCSETA, dan BIMAFEB. Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing organisasi secara unik mengintegrasikan teknologi ke dalam program kerja mereka, seperti pemanfaatan media sosial untuk edukasi kebangsaan, instrumen open-access untuk transparansi keuangan, serta penerapan sanksi organisasi yang tegas maupun pendekatan persuasif dalam menangani pelanggaran etika siber seperti doxing dan plagiarisme. Dibedah melalui kerangka Teori Kewargaan Digital (Digital Citizenship) dan Etika Siber Pancasila, digitalisasi ini menggeser pola kepemimpinan menjadi lebih egaliter dan inklusif, di mana musyawarah virtual tetap diutamakan sebagai instrumen tertinggi guna meredam polarisasi opini di media sosial. Meskipun demikian, ditemukan dampak residu berupa potensi terkikisnya solidaritas sosial di dunia nyata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi digital terbukti efektif mengakselerasi jangkauan nilai positif Pancasila, namun organisasi mahasiswa direkomendasikan untuk menerapkan model aktivitas hibrida (kombinasi daring dan luring) secara seimbang, didukung oleh pelatihan literasi digital terstruktur dari pihak rektorat.

Kata Kunci: Pancasila, Organisasi Mahasiswa, UNIPMA, Era Digital.

PENDAHULUAN

Era digital telah mengubah lanskap interaksi sosial dan cara berpikir generasi muda secara masif. Sebagai aktor intelektual, mahasiswa dihadapkan pada dua realitas yang kontradiktif: kemudahan akses informasi di satu sisi, dan ancaman disintegrasi ideologi akibat paparan radikalisme, hoaks, serta individualisme ekstrem di satu sisi. Dalam konteks ini, Universitas PGRI Madiun (UNIPMA) sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa mahasiswanya tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga tetap memegang teguh Pancasila sebagai pedoman hidup berkebangsaan. Secara teoretis, perilaku partisipatif dan etika komunikasi mahasiswa di ruang siber dapat dianalisis menggunakan Teori Kewargaan Digital (Digital Citizenship Theory). Berdasarkan publikasi jurnal mutakhir oleh Muhajir dan Tiara (2025), teori ini menegaskan bahwa menjadi warga digital yang cerdas tidak sekadar merujuk pada kecakapan teknis (digital skills), melainkan pada penguatan literasi digital dan budaya politik yang bertanggung jawab di ruang siber. Dalam konteks keindonesiaan, pilar-pilar digital citizenship tersebut harus direkonstruksi agar berakar kuat pada Pancasila yang berfungsi sebagai basis moral. Ketika mahasiswa berorganisasi secara daring, mereka mempraktikkan komponen kewargaan digital ini melalui platform komunikasi dan program kerja digital mereka.

Selain itu, kajian ini diperkuat oleh Teori Etika Sosial di Ruang Digital yang dikembangkan dalam artikel ilmiah oleh Nasoha (2025). Teori ini menempatkan Pancasila bukan sebagai doktrin kaku, melainkan sebagai etika sosial dan kompas moral utama (moral compass) untuk menghadapi ekses negatif dunia maya seperti polarisasi, doxing, dan hilangnya adab berkomunikasi.Beberapa literatur terdahulu menunjukkan bahwa internalisasi Pancasila pada generasi Z cenderung monoton jika hanya mengandalkan metode doktrinasi konvensional. Dibutuhkan ruang artikulasi baru yang adaptif terhadap karakteristik dunia digital. Kebaruan ilmiah (novelty) dari artikel ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik membedah bagaimana struktur formal organisasi mahasiswa di UNIPMA mengonversi nilai-nilai abstrak Pancasila ke dalam bentuk program kerja nyata, platform digital, dan etika komunikasi daring sehari-hari. Kajian ini penting untuk mengisi celah empiris mengenai pola adaptasi nilai kebangsaan dalam iklim organisasi kampus lokal yang berbasis digital. Oleh karena itu, tujuan utama dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila oleh organisasi mahasiswa UNIPMA di era digital serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memberikan gambaran mendalam dan faktual mengenai fenomena yang diteliti. Secara metodologis, pendekatan kualitatif deskriptif ini dipilih karena relevan untuk membedah perilaku sosial-politik di ruang siber, yang dalam Teori Kewargaan Digital (*Digital Citizenship*) oleh Muhajir dan Tiara (2025) dipandang sebagai realitas dinamis yang pemaknaannya harus digali langsung dari perspektif para aktor utamanya. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari subjek penelitian, yaitu para pengurus inti organisasi mahasiswa di lingkungan UNIPMA, termasuk ketua BEM dan ketua Himpunan Mahasiswa. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria bahwa informan merupakan pengurus aktif yang terlibat langsung dalam perancangan dan pelaksanaan program kerja organisasi berbasis digital. Teknik pengumpulan data utama yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur (semi-structured interview). Wawancara dilakukan secara tatap muka maupun melalui platform virtual (seperti Zoom atau Google Meet). Guna menjamin validitas teoretis, pedoman wawancara disusun dengan mengadopsi indikator-indikator utama dari Teori Etika Siber Pancasila menurut Nasoha (2025) dan pilar kewargaan digital menurut Azzahra dkk. (2022). Pertanyaan wawancara diarahkan untuk menggali aspek ketuhanan (moderasi beragama di media sosial), kemanusiaan (aksi sosial digital), persatuan (kolaborasi lintas organisasi), kerakyatan (pengambilan keputusan mufakat daring), dan keadilan sosial (pemerataan informasi program kerja). Data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian ditranskripsikan secara utuh dan dikodekan (*coding*) berdasarkan kategorisasi instrumen teoretis tersebut. Proses analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tiga alur kegiatan simultan: reduksi data, penyajian data (*display data*), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam tahap reduksi dan penyajian data, Teori Kewargaan Digital dan Teori Etika Siber Pancasila digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menyaring, mengelompokkan, dan menginterpretasikan tindakan-tindakan digital organisasi mahasiswa agar hasil analisis yang disajikan tetap berada pada konteks penguatan karakter kebangsaan di ruang siber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila di era digital pada organisasi mahasiswa Universitas PGRI Madiun (UNIPMA) melibatkan empat organisasi sebagai representasi, yaitu UKM INKAI, KOPMA, ACCSETA, dan BIMAFEB. Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang telah disintesis, masing-masing

organisasi memiliki karakteristik dan fokus yang khas dalam menerjemahkan nilai Pancasila ke dalam program kerja berbasis teknologi, penegakan etika siber, model kepemimpinan, hingga respons terhadap inklusivitas isu.

Fokus implementasi pada UKM INKAI bertumpu pada pemanfaatan platform Instagram dan TikTok untuk mengedukasi publik mengenai nilai sportivitas dan disiplin, serta menerapkan transparansi keuangan organisasi melalui WhatsApp dan Google Drive. Praktik ini sejalan dengan konsep *digital literacy* dan *digital communication* dalam Teori Kewargaan Digital (Muhajir & Tiara, 2025), di mana teknologi diarahkan untuk menyebarkan nilai positif dan menegakkan keterbukaan informasi. Dalam ranah etika siber, UKM INKAI memilih pendekatan persuasif-humanis berupa imbauan lisan untuk menangani kasus plagiasi maupun doxing. Langkah ini mencerminkan pengejawantahan Teori Etika Siber Pancasila khususnya Sila Kedua (Nasoha, 2025), yang menekankan penyelesaian pelanggaran siber melalui pemulihan kesadaran moral kemanusiaan secara kekeluargaan.Pola kepemimpinan yang diterapkan bersifat keteladanan dengan membuka ruang diskusi daring yang demokratis antara senior dan junior, serta mengutamakan musyawarah internal saat merespons kebijakan kampus.

Sementara itu, KOPMA mengintegrasikan nilai Pancasila melalui edukasi gotong royong dan digitalisasi data anggota secara terbuka. KOPMA secara berkala memberikan bimbingan etika bermedia sosial dan menolak keras segala bentuk plagiarisme maupun doxing di lingkungan akademik merupakan wujud nyata dari pilar *digital etiquette* (etika digital) dalam Teori Kewargaan Digital (Azzahra dkk., 2022). Teori tersebut menyatakan bahwa warga digital yang bertanggung jawab wajib menghormati hak digital orang lain serta menjaga integritas akademik di ruang siber. Tata kelola organisasinya dijalankan secara egaliter virtual melalui komunikasi yang transparan, di mana setiap program kerja dapat diakses secara terbuka dan konflik diselesaikan melalui forum diskusi bersama untuk mencapai solusi yang adil.

Di sisi lain, ACCSETA menunjukkan komitmen penguatan nilai persatuan dan toleransi melalui produksi konten edukasi keagamaan serta digitalisasi pemungutan suara via e-voting dan keterbukaan kas melalui Google Sheets. Kehadiran *e-voting* dan konten moderasi ini memenuhi pilar *digital participation* dan *digital rights* dalam Teori Kewargaan Digital (Firmansyah, 2025), yang menjamin hak berpendapat dan hak politik setiap anggota secara adil di ruang virtual. Organisasi ini menerapkan supremasi aturan yang ketat berdasarkan AD/ART terhadap pelanggaran privasi, serta aktif menyelenggarakan workshop deteksi hoaks secara terjadwal. Ditinjau dari Teori Etika Siber

Pancasila (Hasan dkk., 2024), langkah preventif dan represif yang diambil ACCSETA ini berfungsi sebagai filter ideologi normatif guna melindungi anggota dari ancaman polarisasi opini dan distorsi informasi di era *post-truth*. Sistem rekrutmen dan kepemimpinannya dirancang inklusif dengan parameter penyelesaian masalah berbasis mufakat, serta menyediakan wadah musyawarah terbuka menggunakan bahasa yang komunikatif.

Terakhir, BIMAFEB berfokus pada pembuatan konten visual kreatif pada hari-hari besar nasional dan digitalisasi pendataan anggota menggunakan Google Form. Terhadap pelanggaran privasi dan etika digital, BIMAFEB menjatuhkan tindakan dan sanksi organisasi yang tegas. Kaderisasi di dalam BIMAFEB mengutamakan suasana nondiskriminatif dan menilai kesantunan komunikasi siber sebagai indikator kelulusan pengurus baru. Saat dihadapkan pada isu sensitif, diskusi internal dijadikan instrumen utama untuk menekan respons emosional di media sosial, sembari tetap membuka program digital yang inklusif lintas jurusan dan angkatan.

Jika dianalisis secara mendalam, integrasi teknologi dalam program kerja ormawa UNIPMA tersebut merupakan perwujudan nyata dari Sila Ketiga (Persatuan Indonesia) dan Sila Kelima (Keadilan Sosial). Pemanfaatan Instagram dan TikTok bukan lagi sekadar papan pengumuman digital, melainkan instrumen edukasi nilai kebangsaan. Temuan empiris ini senada dengan argumen Safitri dan Dewi (2021) bahwa media sosial memegang peranan krusial bagi generasi milenial dan generasi Z sebagai medium pembentuk sikap kebangsaan, asalkan diarahkan pada aktivitas positif. Dari aspek keadilan sosial, pemanfaatan instrumen open-access seperti Google Sheets dan Google Drive dalam memublikasikan laporan keuangan organisasi menjadi bukti nyata adaptasi nilai transparansi. Keterbukaan informasi berbasis data ini sangat krusial di ruang digital guna menekan potensi sengketa informasi (Elno dkk., 2024). Digitalisasi ini meminimalkan kecemburuan sosial dan memastikan seluruh hak informasi anggota terpenuhi secara merata tanpa ada pihak yang ditinggalkan. Pada ranah literasi digital dan etika akademik, ditemukan adanya korelasi kuat dengan pengamalan Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab). Fenomena pelanggaran privasi seperti doxing dan penodaan hak cipta berupa plagiarisme direspons secara serius oleh seluruh organisasi kampus. Penegakan etika sosial dan akademis ini sejalan dengan gagasan Nasoha (2025) yang menempatkan Pancasila sebagai basis etika moral utama dalam menghadapi ekses negatif siber dunia maya. Pendekatan yang diambil menunjukkan variasi model; UKM INKAI memilih jalur persuasif-humanis melalui

musyawarah dan edukasi personal, sedangkan ACCSETA dan BIMAFEB menerapkan supremasi aturan lewat sanksi organisasi yang tegas untuk menjaga kode etik. Kendati demikian, tantangan terbesar di era post-truth ini adalah sirkulasi hoaks. ACCSETA dan BIMAFEB telah selangkah lebih maju dengan merancang workshop literasi digital dan penguatan karakter guna membentengi anggotanya dari arus informasi palsu. Sebagaimana ditegaskan oleh Muhajir dan Tiara (2025), penguatan literasi digital berbasis nilai Pancasila di lingkungan pendidikan tinggi adalah benteng utama bagi generasi Z untuk menghalau sebaran hoaks dan manipulasi informasi. Di sisi lain, UKM INKAI dan KOPMA masih mengandalkan pengarahan bimbingan lisan secara berkala karena adanya keterbatasan dalam pelaksanaan agenda pelatihan formal.

Domain kepemimpinan dan kaderisasi mencerminkan pergeseran menuju struktur yang lebih egaliter dan inklusif di ruang virtual, sejalan dengan esensi Sila Keempat. Wibawa pemimpin di era digital tidak lagi dibangun melalui dominasi atau instruksi satu arah yang otoriter. Sebagaimana ditunjukkan dalam kajian Hidayah dkk. (2022), keterlibatan aktif mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan berfungsi strategis sebagai sarana internalisasi nilai kerja sama, musyawarah, dan penghargaan terhadap keberagaman secara mendalam. Hasil wawancrasa pada UKM INKAI mematahkan stigma senioritas bela diri, di mana ruang diskusi demokratis tetap dibuka lebar di platform koordinasi daring. Begitu pula dengan BIMAFEB yang menciptakan atmosfer nondiskriminatif agar anggota baru dapat menyuarakan aspirasinya secara bebas. Nilai-nilai Pancasila ini bahkan telah diturunkan menjadi parameter konkret dalam sistem rekrutmen online. Karakter seperti kemampuan berkolaborasi, toleransi terhadap perbedaan pendapat, serta kesantunan berkomunikasi di media sosial menjadi indikator utama kelulusan calon pengurus baru di seluruh organisasi yang diteliti.

Dalam merespons berbagai isu nasional maupun kebijakan internal kampus, musyawarah tetap ditempatkan sebagai jalan keluar tertinggi untuk meredam polarisasi digital. Ketika dihadapkan pada isu sensitif, baik UKM INKAI, KOPMA, ACCSETA, maupun BIMAFEB secara seragam memprioritaskan pelaksanaan diskusi internal terlebih dahulu sebelum mengeluarkan pernyataan sikap ke ruang publik. Pola ini efektif untuk menekan respons emosional sepihak di media sosial yang berpotensi memperkeruh situasi. Selain itu, inklusivitas aktivitas digital diwujudkan dengan membuka akses keterlibatan program kerja lintas jurusan dan angkatan. Penggunaan bahasa yang komunikatif dan tidak membeda-bedakan latar belakang mahasiswa menjadi strategi bersama untuk

menjamin keadilan akses dalam ekosistem digital UNIPMA.

Secara umum, efektivitas implementasi Pancasila di era digital dinilai memberikan dampak akselerasi yang luar biasa terhadap jangkauan nilai-nilai positif. Namun, seluruh organisasi sepakat adanya dampak residu berupa potensi terkikisnya ikatan solidaritas nyata akibat interaksi yang terlalu bertumpu pada dunia maya. Oleh sebab itu, integrasi antara aktivitas digital dan tatap muka langsung mutlak diperlukan sebagai ruang penyeimbang. Menanggapi realitas ini, terdapat harapan kolektif yang besar dari organisasi mahasiswa terhadap pihak universitas (UNIPMA). Rektorat diharapkan tidak hanya memberikan dukungan materiil yang selaras dengan Teori Kewargaan Digital (*Digital Citizenship*) yang dikembangkan oleh Muhajir dan Tiara (2025). Berdasarkan teori tersebut, institusi pendidikan tinggi bertanggung jawab penuh untuk memfasilitasi elemen literasi dan etika digital agar mahasiswa memiliki kecakapan emosional dan intelektual dalam menyaring informasi. Dukungan institusional ini juga menjadi krusial jika dibedah melalui Teori Etika Siber Pancasila menurut Nasoha (2025), di mana rektorat dipandang sebagai regulator utama yang wajib menyediakan ekosistem siber yang sehat, aman, dan inklusif. Melalui kebijakan kampus yang mendukung pelatihan literasi siber bersertifikasi serta ruang kolaborasi lintas organisasi, UNIPMA dapat membantu mahasiswa mengonversi nilai luhur Pancasila menjadi benteng karakter digital yang kuat di ruang publik. Berupa pemenuhan fasilitas teknologi modern, melainkan juga dukungan moril yang berkelanjutan melalui pelatihan literasi digital bersertifikasi serta penyediaan wadah kolaborasi lintas organisasi untuk memperkuat karakter Pancasila mahasiswa di ruang siber.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa organisasi mahasiswa di Universitas PGRI Madiun (UNIPMA) telah berhasil mentransformasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam ekosistem siber melalui tindakan organisasional yang nyata dan adaptif. Hasil penelitian secara empiris menunjukkan bahwa pengamalan Sila Pertama dan Ketiga terwujud melalui langkah nyata ACCSETA yang memproduksi konten edukasi moderasi beragama serta menerapkan sistem e-voting yang inklusif, yang diperkuat oleh BIMAFEB melalui pembuatan konten visual kreatif untuk memperingati hari besar nasional secara berkala di media sosial. Pada ranah Sila Kedua, pelindungan terhadap martabat manusia dan etika akademik dilakukan melalui mitigasi pelanggaran siber seperti doxing dan plagiarisme, di mana UKM INKAI mengedepankan pendekatan persuasif-humanis, sedangkan ACCSETA dan BIMAFEB menerapkan supremasi sanksi yang tegas berbasis AD/ART sekaligus aktif memitigasi

hoaks lewat penyelenggaraan workshop literasi digital secara mandiri.

Selanjutnya, implementasi Sila Keempat tercermin dari pergeseran model kepemimpinan konvensional menjadi pola interaksi virtual yang egaliter, di mana UKM INKAI berhasil mematahkan stigma senioritas fisik dengan membuka ruang koordinasi daring yang demokratis, KOPMA mengutamakan forum diskusi terbuka untuk penyelesaian konflik, dan BIMAFEB melembagakan parameter kesantunan komunikasi siber sebagai indikator kelulusan pengurus baru. Transformasi ini disempurnakan oleh manifestasi Sila Kelima melalui penegakan transparansi informasi tata kelola, di mana UKM INKAI, KOPMA, dan ACCSETA memanfaatkan instrumen digital seperti WhatsApp, Google Drive, hingga Google Sheets untuk mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka demi menjamin keadilan akses data bagi seluruh anggota organisasi.

Meskipun efektivitas teknologi mampu mengakselerasi jangkauan program kerja, hasil penelitian mengidentifikasi adanya dampak residu berupa potensi terkikisnya ikatan solidaritas emosional nyata akibat interaksi yang terlalu dominan di dunia maya. Guna mengoptimalkan keberlanjutan implementasi ini, disarankan bagi organisasi mahasiswa untuk mengombinasikan (hibrida) aktivitas digital dengan interaksi tatap muka secara seimbang demi menjaga solidaritas sosial di dunia nyata. Kepada pihak rektorat UNIPMA, diharapkan dapat memberikan dukungan moril yang terstruktur melalui penyelenggaraan program pelatihan literasi digital bersertifikasi serta penyediaan ruang kolaborasi lintas organisasi yang inklusif untuk memperkuat benteng karakter Pancasila mahasiswa di ruang siber.

DAFTAR PUSTAKA

Agustinova, D. E., & Miskawi, M. (2025). Pancasila dan Revolusi Industri 4.0: Menjaga Relevansi Nilai-Nilai Pancasila di Era Digital. Jurnal Sangkala, 4(2), 71–80.

Alzana, A. W., & Harmawati, Y. (2021). Pendidikan Pancasila sebagai Pendidikan Multikultural. Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 9(1), 51–57.

Ardana, I. M. (2024). Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila di Era Digital. Jurnal Pendidikan Nasional, 14(2), 113–128.

Azzahra, S. M. P., Setiawati, R., & Widodo, H. (2022). Strategi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Membangun Etika Digital di Era Digital. Madura: Universitas Islam Madura.

Elno, Z. N., Junaidi, K., Dewi, S., Sarita, W. R., Rahmayani, S., & Susanti, E. (2024). Implementasi Sila Ke-5 Pancasila dalam Menyikapi Ketimpangan Digital di Era Globalisasi. Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, 3(4), 5121–5125.

Fauziah, L., & Prasetyo, D. (2023). Hoaks, Etika Digital, dan Penguatan Nilai Kebangsaan. Jurnal Ilmu Komunikasi, 22(1), 45–59.

Firmansyah, A. (2025). Revitalisasi Nilai Pancasila dalam Menghadapi Tantangan Digitalisasi. Jurnal

Pancasila dan Kewarganegaraan, 17(1), 33–47.

Hasan, Z. (2025). Pancasila dan Kewarganegaraan. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D. (2024). Relevansi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat di Era Digital. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 2(4), 425–433.

Hidayah, N., Simatupang, R., & Belladonna, A. (2022). Internalisasi Nilai Pancasila dalam Pembelajaran Era Digital. Jurnal Civics, 20(3), 201–214.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. California: SAGE Publications.

Muhajir, A. L., & Tiara, M. (2025). Strengthening Digital Literacy and Political Culture for Gen-Z Through Pancasila Education Learning in Higher Education. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 22(2), 524–534.

Nasoha, F. (2025). Pancasila Sebagai Etika Sosial di Ruang Digital. Jurnal Pembangunan Sosial, 8(2), 102–118.

Nurohmah, W., & Dewi, D. A. (2024). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Era Globalisasi Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Pada Setiap Individu. Jurnal Kewarganegaraan, 6(1), 1403–1409.

Safitri, A., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Pedoman Generasi Milenial dalam Bersikap di Media Sosial. EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling, 3(1), 78–87.

Savitri, A. S., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan di Era Globalisasi. Inventa: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 5(2), 165–176.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.